



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



Perpustakaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS





Kata Pengantar

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Rancangan Rencana Kerja-PD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 tidak terlepas dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029. Didalamnya terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026 dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan nasional dan daerah pada urusan kearsipan dan urusan perpustakaan, serta mengimplementasikan visi dan misi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini kami jadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

Tarempa, 17 April 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan Dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 197006242003121005



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu kepada Renja Kementerian/Lembaga terkait dan RKPD Provinsi.

dan mempedomani kepada Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa rencana strategis perangkat daerah sehingga perubahan renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam renstra PD sesuai arahan operasional dalam RKPD;
2. Rancangan Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan dalam KUA dan PPAS dan perencanaan penganggaran program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RAPBD tahun 2026;
3. Rancangan Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.



Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e) Pengelolaan barang milik Daerah;
- f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program



dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 15



- Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



- Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan



- Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
 33. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 mempunyai maksud, menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten



Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2030;
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2026.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang,** Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Awal Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi.
- I.2. Landasan Hukum,** Menjelaskan Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
- I.3. Maksud dan Tujuan,** Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renja PD.
- I.4. Sistematika Penulisan,** Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Awal Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA PD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja PD Tahun

Lalu dan Capaian Renstra PD, memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) dan perkiraan capaian tahun berjalan (triwulan II), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) PD.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti rencana detail tata ruang, dan peta rupa bumi, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan



catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan.

II.4. Review Terhadap Rancangan Renja. Dalam bagian ini diuraikan perbandingan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan berikut temuan-temuan dan catatan penting terhadap Rancangan RKPD.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

III.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis PD.

III.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan



terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA PD

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA PD DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan awal rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rancangan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan



sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2022 dan perkiraan maju yang menjadi target di tahun 2026. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sebagai berikut:



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun (2023)	Realisasi Renja OPD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 2 0 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 2 0 3 1 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang terselesaikan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 2 0 3 1 06	Kegiatan administrasi umum perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terselesaikan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2026

2	2	0	2.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
2	2	0	2.	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100%	-100%	100%	100%	100%	100%
2	2	0		Program Pembinaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Cakupan layanan keperpustakaan	100%	-	50%	73%	146%	67%	94%	94%
2	2	0	2.	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	-	50%	58%	116%	67%	72%	72%
2	2	0	2.	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Gemar Membaca di Daerah	100%	-	50%	87%	174%	67%	91%	91%
2	2	0		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tersusunnya Arsip Yang Sesuai Standar	55%	-	32%	2,90%	0,9%	42%	14,70%	0,27%
2	2	0	2.	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	55%	-	32%	2,90%	0,9%	42%	14,70%	0,27%



Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau bahkan melebihi target kinerja program/kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat bervariasi, dan beberapa di antaranya mungkin termasuk:

1. Keterbatasan Anggaran: Kurangnya alokasi dana dapat menghambat kemampuan dinas dalam menyediakan layanan yang memadai atau melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur perpustakaan dan arsip.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia: Jika dinas memiliki jumlah pegawai yang tidak mencukupi atau kurangnya kualifikasi dan keterampilan tertentu, maka pencapaian target kinerja dapat terhambat.
3. Kurangnya Infrastruktur dan Sarana Prasarana: Perpustakaan dan arsip yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang baca yang nyaman, aksesibilitas yang baik, dan teknologi informasi yang mutakhir dapat mempengaruhi kinerja program.
4. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Minimnya minat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan dan arsip juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai target kinerja, terutama dalam hal meningkatkan jumlah pengunjung atau peminjam.
5. Belum terpenuhi sarana/prasarana instrumen pengawasan sebagai dasar tingkat penilaian Arsip Daerah berupa peraturan tentang kearsipan.

Dalam mengatasi faktor-faktor ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, menyusun strategi yang terarah, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal, serta mengembangkan kapasitas internal untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang telah disebutkan sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat mengambil beberapa kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran, antara lain:



1. Penyusunan Rencana Strategis: Menyusun rencana strategis jangka panjang yang jelas dan terukur, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja, serta menetapkan tujuan yang realistis dan terukur.
2. Pengalokasian Anggaran yang Memadai: Melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran, dengan memberikan prioritas pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan strategis dan kinerja yang optimal.
3. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Mengidentifikasi dan mengimplementasikan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur.
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, serta memastikan bahwa jumlah pegawai mencukupi dan memiliki distribusi keterampilan yang sesuai.
5. Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Prasarana: Mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur perpustakaan dan arsip, termasuk pembangunan ruang baca yang nyaman, pengadaan teknologi informasi yang mutakhir, dan perawatan fasilitas secara berkala.
6. Stimulasi Partisipasi Masyarakat: Melakukan program-program promosi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan dan arsip.
7. Percepatan penyusunan peraturan tentang kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Arsip Daerah

Dengan mengimplementasikan kebijakan dan tindakan ini secara terintegrasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian target kinerja mereka dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan dan arsip.



II.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor, Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepulauan Anambas. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu, Kepala Dinas.
2. Pembantu Pimpinan yaitu, Sekretaris yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Kabid Perpustakaan
 - b. Kabid Arsip Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

Tugas: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang



- perpustakaan dan kearsipan;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - e) Pengelolaan barang milik Daerah;
 - f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Selain tugas dan fungsi diatas, secara umum Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berperan dalam memperkuat literasi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Sama halnya dengan perpustakaan umum lainnya, Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki layanan anak. Berbagai kegiatan layanan disiapkan untuk kebutuhan anak-anak dari pemilihan bahan pustaka hingga pada pelayanan yang disesuaikan menurut usia.

Dalam rangka mewujudkan perpustakaan ramah anak, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan fasilitas berupa sarana bermain yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

II.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah yang menangani



urusan wajib bidang kearsipan dan perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk pada 31 Oktober 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, sehingga belum dapat dilakukan penyusunan analisis kinerja pelayanan.

Beberapa indikator ataupun pengukuran yang menjadi objek penting dalam pelaksanaan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan antara lain adalah rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, rasio perpustakaan persatuan penduduk, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Predikat SAKIP, Nilai ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban.

Tabel berikut merupakan resume analisis kinerja pelayanan perangkat daerah yang diukur dengan menggunakan alat ukur indicator sebagaimana tersebut di atas.



Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

No.	Indikator	SPM	Target Capaian Setiap Tahun						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan		0,09	0,21	0,58	0,72	0,80	0,87	0,08	0,61	0,79	1,06	1,10	1,20	
2.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,0015	0,0016	0,0017	0,0018	0,0019	0,0020	0,0020	0,0021	0,0021	0,0025	0,0019	0,0019	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi		-	C (50)	C (50)	CC (55)	CC (55)	B (61)	-	-	BB (72,34)	BB(72,34)	BB (75)	BB (80)	
4.	Nilai Predikat SAKIP		-	C (50)	C (50)	CC (55)	CC (55)	B (61)	-	-	C (34,21)	B 65,10	BB (75)	BB (80)	
5.	Persentase Pengelolaan Arsip Yang Sesuai Dengan Standar Yang Ditetapkan.		-	25%	35%	50%	65%	70%	-	0%	2,9%	14,7%	30%	35%	



II.4. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di daerah
2. Rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
3. Belum ada identifikasi naskah kuno yang dilestarikan
4. Belum maksimalnya pengelolaan arsip dinamis
5. Belum optimalnya Pengelolaan arsip statis dan in aktif
6. Belum dilaksanakannya pembangunan jaringan informasi kearsipan di seluruh lembaga pemerintahan kabupaten
7. Kurang optimalnya pemanfaatan metode, sarana prasarana serta sumberdaya manusia dalam pelayanan terhadap masyarakat.
8. Masih kurangnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam proses pembangunan daerah.

Adapun tujuan dari Identifikasi masalah yaitu agar kita mendapatkan sejumlah masalah yang saling berhubungan guna tercapainya maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu antara lain:

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang



tertuang dalam RPJMD 2025-2030. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Sampai pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan menuju lebih baik ;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;
4. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;
5. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

B. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;



2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan sumberdaya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
4. Dalam memperkuat literasi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki layanan anak. Berbagai kegiatan layanan disiapkan untuk kebutuhan anak-anak dari pemilihan bahan pustaka hingga pada pelayanan yang disesuaikan menurut usia.

C. Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

1. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan *Geographic Information System* (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan;
3. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.
4. Menciptakan akses dan pemanfaatan sarana prasarana perpustakaan yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan.
5. Dalam rangka mewujudkan perpustakaan ramah anak, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan fasilitas berupa sarana bermain yang aman dan nyaman bagi anak-anak.



II.4. Review Terhadap Rancangan Renja 2026

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2026 lebih ditekankan kepada peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.



Tabel 2.3.Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode Rekening	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Jemaja Timur	Indikator Kinerja	Rancangan RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran		
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah										
Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang										
			Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah				3.532.102.637			4.599.037.210
2.23.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.228.167.651			3.465.427.364
	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perpus takaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	21.113.496	APBD	12 Bulan	60.000.000	
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan terselesaikan	Dinas Perpus takaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	2.591.914.637	APBD	12 Bulan	2.591.914.637	



RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2026

		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	265.222.751	APBD	12 Bulan	435.075.363	
		2.07	Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	300.026.364	APBD	12 Bulan	300.026.364	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Dokumen Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	38.658.403	APBD	12 Bulan	58.411.000	
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	11.232.000	APBD	12 Bulan	20.000.000	
2.23	02		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan			248.480.592	APBD		1.028.442.572	
		2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	175.262.942	APBD	12 Bulan	691.451.795	
		2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Gemar membaca di Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	73.217.650	APBD	12 Bulan	336.990.777	



RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2026

2.24	02		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tersusunnya Arsip yang Sesuai Standar			55.454.394	APBD	12 Bulan	105.167.274	
		2.01.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	55.454.394	APBD	12 Bulan	105.167.274	



Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan dinas yang baru terbentuk sehingga masih dalam tahapan pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana serta pembangunan sumber daya manusia. Keterbatasan dalam anggaran menjadi kendala dalam mencapai target program dan kegiatannya, sehingga membatasi potensi dan menghambat upaya mencerdaskan masyarakat melalui akses informasi dan pengetahuan.

Dampak Kekurangan Anggaran:

- Koleksi Buku Terbatas: Dana yang minim membatasi pembelian buku baru, sehingga koleksi pustaka tidak berkembang pesat. Masyarakat pun kehilangan akses terhadap beragam informasi dan pengetahuan terkini.
- Fasilitas Minim: Kurangnya dana menghambat pengembangan infrastruktur perpustakaan, seperti ruang baca yang nyaman, teknologi informasi yang memadai, dan akses internet yang stabil. Kenyamanan pengunjung dan kualitas layanan pun terancam.
- Kegiatan Terbatas: Program-program edukasi dan promosi minat baca terhambat karena minimnya anggaran. Jangkauan program ke masyarakat pun terbatas, sehingga potensi pengembangan literasi terhambat.
- Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas: Dana yang minim menghambat perekrutan dan pengembangan SDM yang berkualitas. Perpustakaan pun kekurangan tenaga profesional untuk mengelola dan mengembangkan layanannya secara optimal.

Solusi yang Diperlukan:

- Peningkatan Anggaran: Solusi utama adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah. Hal ini penting untuk memastikan tersedianya



dana yang memadai untuk pengembangan koleksi pustaka, infrastruktur, program kegiatan, dan pengembangan SDM.

- Kerjasama Strategis: Jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti swasta, komunitas, dan organisasi non-profit dapat membantu dalam penyediaan sumber daya dan pendanaan program.
- Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien harus dioptimalkan. Penerapan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan pun menjadi kunci.
- Dukungan Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan dan mendukung program-programnya juga menjadi solusi penting.

Kekurangan anggaran merupakan hambatan utama dalam mencapai capaian indikator program dan kegiatan. Upaya peningkatan anggaran, kerjasama strategis, efisiensi dan efektivitas, serta dukungan masyarakat menjadi solusi yang esensial untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah dapat memberikan layanan yang optimal dan berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai dengan tahapan penyusunan Rancangan Renja tahun 2026, untuk program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum ada usulan dari masyarakat maupun Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang masuk ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah telah mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Ranwal Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Kep. Anambas tahun 2026. Adapun beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional yaitu:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan;
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- h. Serta dengan tetap mengarah pada pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Kota Sehat (KKS), pengarusutamaan gender (PUG), pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGS), konektivitas wilayah, penerapan blue economy, inovasi daerah dan pemenuhan SPM.



III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.



2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan.
3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi.
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.

Sasaran :

1. Sasaran yang terdapat pada tujuan “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur” adalah sebagai berikut:
 - ☐ Meningkatnya kualitas SDM yang inovatif sehingga mampu bersaing dan menjunjung nilai-nilai budaya.
2. Sasaran yang Terdapat pada tujuan “ Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan” adalah sebagai berikut:
 - ☐ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang merata dan berkeadilan
 - ☐ Tersedianya berbagai infrastruktur yang memadai;
3. Sasaran yang terdapat pada tujuan “ Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi” adalah sebagai berikut:
 - ☐ Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Sasaran yang terdapat pada tujuan “Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi” adalah sebagai berikut:
 - ☐ Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan
 - ☐ Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan



5. Sasaran yang terdapat pada tujuan “ Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan” adalah sebagai berikut:

- ☐ Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
- ☐ Meningkatnya kualitas Pendidikan
- ☐ Menekan lajunya tingkat pengangguran
- ☐ Menurunnya angka kemiskinan

Berdasarkan RKPD Kab. Kep. Anambas tahun 2026, tema pembangunan yang diusung ialah:

“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”

Rancangan Prioritas Pembangunan:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata.
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru.
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif.
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan literasi perpustakaan		Rasio jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Jumlah kunjungan perpustakaan / Jumlah target kunjungan yang ditetapkan	0,21	0,58	0,72	0,8	0,87
		Meningkatnya ketersediaan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah perpustakaan / Jumlah Populasi penduduk tahun berkenaan	0,0016	0,0017	0,0018	0,0019	0,0020
2	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi		Indeks Reformasi Birokrasi		C (50)	C (50)	CC (55)	CC (55)	B (61)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Predikat SAKIP		C (50)	C (50)	CC (55)	CC (55)	B (61)



		Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Persentase Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	Jumlah ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggung jawaban/ target tahunan * 100%	25%	35%	50%	65%	70%
--	--	---------------------------------------	---	--	-----	-----	-----	-----	-----



III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 telah dirumuskan melalui pertimbangan terhadap berbagai faktor yang menjadi penunjang terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Berbagai faktor tersebut telah dirumuskan kedalam satu kesatuan yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan literasi dan urusan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa faktor pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Target pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Tegaknya Perundang-undangan Daerah;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
5. Upaya mendukung program pemerintah tentang Kabupaten/Kota Sehat
6. (KKS), Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender (PUG);

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual yang berpengaruh terhadap Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tahun 2026.

Untuk tahun 2026, dengan mengacu kepada pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melaksanakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan. Cakupan lokasi pelaksanaan program kegiatan meliputi seluruh wilayah kabupaten Kepulauan Anambas yang menyentuh seluruh masyarakat dan perangkat daerah.

Total pagu indikatif yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 3.532.102.637 yang bersumber dari Dana Transfer Umum- Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026.



Tabel 3.2. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Nama Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.228.167.651
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.113.496
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	21.113.496
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.591.914.637
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.512.102.637
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	79.812.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				265.222.751
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	42.773.862
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Bulan	17.768.509
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	24.162.380



RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2026

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	15.137.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	165.381.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.026.364
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	12 Bulan	300.026.364
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.658.403
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	38.658.403
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.232.000
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	11.232.000
	Program Pembinaan Perpustakaan				248.480.592
7	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				175.262.942
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Layanan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	8 Layanan	103.547.442
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Tenaga Perpustakaan Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Perpustakaan	60 Orang	25.792.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	200 Eksemplar	45.923.500
8	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				73.217.650



RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2026

	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Terselenggaranya Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi	5 Kegiatan	42.116.700
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Penerima Penghargaan	12 Bulan	31.100.950
	Program Pengelolaan Arsip				55.454.394
9	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				55.454.394
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Arsip Dinamis Yang Tersedia Sesuai Standar	12 Bulan	38.620.094
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Lembaga Yang Dilakukan Pengawasan Arsip Dinamis	12 Bulan	16.834.300



BAB IV

IV.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada Tahun 2026 Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ini terdapat 3 Program, 9 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan. Yang Mana Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program

Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 ada sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pembinaan Perpustakaan.
- c. Program Pengelolaan Arsip;

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.



Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan. Adapun sub kegiatan tersebut antara lain:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan. Adapun sub kegiatan tersebut antara lain :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun sub kegiatannya antara lain :

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun sub kegiatannya antara lain :

- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun sub kegiatannya antara lain :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

g. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun sub kegiatannya antara lain :

- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas



- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- h. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun sub kegiatannya antara lain :
 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat;
 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.
- i. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun sub kegiatannya antara lain :
 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota;

Berikut rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3,3.



**Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kepulauan Anambas**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode Rekening			Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Jemaja Timur	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju (Tahun 2027)	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			3.532.102.637				4,591,733,428	
			Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang								
2.23			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	2.928.141.287	APBD		12 Bulan	3,806,583,673
	01.	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	21.113.496	APBD		12 Bulan	27,447,545
	01.	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Terselesaikan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	2.591.914.637	APBD		12 Bulan	3,369,489,028



RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2026

	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administarsi Umum Perangkat Daerah Terselesaikan	Dinas Perpus takaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	265.222.751	APBD		12 Bulan	344,789,576
	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daeah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Dinas Perpus takaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	300.026.364	APBD		12 Bulan	390,034,273
	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Dinas Perpus takaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	38.658.403	APBD		12 Bulan	50,255,924
	0.1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dinas Perpus takaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	11.232.000	APBD		12 Bulan	14,601,600
2.23	02		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase cakupan layanan Perpustakaan	Dinas Perpus takaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	248.480.592	APBD		12 Bulan	323,024,770
	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpus takaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	115.663.750	APBD		12 Bulan	150,362,875



RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2026

		2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	73.217.650	APBD		12 Bulan	95,182,945
2.24	02		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tersusunnya Arsip yang sesuai Standar			55.454.394	APBD			72,090,712
		2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	12 Bulan	55.454.394	APBD		12 Bulan	72,090,712



BAB V

P E N U T U P

Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani bagi Perangkat Daerah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah di tahun 2026. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis terkait pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, di level nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi berbagai kebijakan pada tingkat nasional yang ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah juga menjadi multak adanya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi dokumen ini. Semoga Rancangan Renja Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.



Tarempa, 17 April 2025

Kepala Dinas

Perpustakaan Dan Arsip Daerah,



Rusmanda Azmurani, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP 197006242003121005